

# Mengatasi Oligarki Menjangkau Demokrasi Ekonomi

## HIGHLIGHTS

Sudah waktunya pemerintah baru Indonesia yang akan dipimpin Prabowo-Gibran mengambil Langkah-langkah sistematis untuk mengurangi kesenjangan kekayaan dan pendapatan. Dan memperkuat investasi kepada kelas menengah. Ada banyak solusi sudah dilakukan negara lain. Sayangnya Indonesia belum melakukannya. Antara lain, penerapan pajak kekayaan (Wealth Tax), Indonesia masih hanya menerapkan Pajak Pendapatan (Income Tax). Waktunya Pajak Kekayaan diberlakukan oleh pemerintah baru. Solusi lain tak kalah penting adalah beasiswa yang luas kepada mahasiswa, guru dan ragam profesi lainnya. Termasuk penting penerapan UU Perampasan Aset.

Untuk pertanyaan, komentar, dan saran, silahkan hubungi staf redaksi kami, di +62 857-7512-5036 (Laras) atau [office@rpk.org](mailto:office@rpk.org) / Edisi sebelumnya dari RPK Brief dapat diakses di [www.rpk-indonesia.org](http://www.rpk-indonesia.org)

Kantor RPK. Jl. Taman Patra III No.8 B, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. (021) 29410324. Whatsapp: +62 851-6303-5588 (Tiara)



## BACKGROUND



**A Muhaimin Iskandar**, Wakil Ketua DPR RI

Gus Muhaimin mengatakan ketimpangan ekonomi tidak bisa diselesaikan secara parsial maupun tambal sulam. Wakil Ketua DPR ini mengingatkan perlu adanya formula dan inovasi baru untuk memangkas ketimpangan. “Satu hal yang kita tidak bisa mungkiri bahwa ketimpangan ekonomi masih menjadi paradoks yang menyertai dalam proses pembangunan bangsa ini. Mengatasinya tidak bisa parsial, tapi perlu inovasi dan terobosan baru,” ujar Gus Imin.

## 1. Banyak Utang, Ekonomi Stagnan

Hingga Juli 2024, utang Indonesia sudah mencapai Rp 8.502,69 triliun. Naik Rp 57,82 triliun dalam satu bulan. Sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia terus stagnan di level 5,05 persen secara tahunan. Angka ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi triwulan II 2023 yang berada di level 5,08 persen.

Ekonom senior Faisal Basri mengatakan peningkatan utang dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak berbanding lurus ini terjadi lantaran proses utang yang tidak benar. Hal itu tercermin dari tingginya nilai incremental capital output ratio (ICOR). Di era Soeharto hingga SBY, kata Faisal, ICOR Indonesia berada di level 4 hingga 4,6. Sedangkan di era Jokowi periode pertama mencapai 6,5 dan pada periode kedua di level 7.

## 2. Sektor Industri Berjalan Lambat

Langkah Indonesia menjadi negara maju semakin berat lantaran tenaga pendorongnya, yakni sektor industri juga bergerak amat pelan. Sepanjang 2014-2024, sektor industri hanya tumbuh sekitar 3,44 persen per tahun. Angka itu jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan sektor industri Vietnam dan India yang belakangan menjadi primadona ekonomi Asia. Sektor industri di dua negara ini tumbuh di atas 7 persen setiap tahun.

Ekonom senior INDEF Didik J Rachbini mengatakan keterbatasan sektor industri ini membuat ekonomi Indonesia sulit berkembang. Apalagi untuk tumbuh lebih dari 6 persen per tahun. “Yang terjadi mungkin bahkan sebaliknya di mana pertumbuhan ekonomi akan selalu di bawah 5 persen karena terseret pertumbuhan industri yang sangat rendah,” tutur Didik dinukil dari kontan.co.id.

## 3. Kesenjangan Ekonomi Masih Tinggi

Badan Pusat Statistik mencatat gini ratio alias kesenjangan ekonomi Indonesia pada Maret 2024 masih berada di level 0,379. Angka ini menurun sekitar 0,009 poin dari Maret 2023 yang sebesar 0,388.



Sekitar 70 persen keuangan partai untuk menjalankan roda organisasinya masih disumbang oleh kontributor, dalam hal ini pengusaha. Situasi ini, membuat arah kebijakan ekonomi, yang dibentuk anggota DPR atau menteri—yang notabene anggota partai—menjadi tidak sehat. Kontribusi para pengusaha kepada partai ini mengakibatkan anggota parlemen terpilih maupun pejabat di pemerintahan memiliki beban untuk menggolkan agenda masing-masing kontributornya.

DODI AMBARDI  
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Gadjah Mada.

Meski demikian, penurunan ini belum bisa dikatakan baik. Sebab, gini ratio 0,379 ini menunjukkan bahwa sejatinya kesenjangan ekonomi antara penduduk miskin dengan orang kaya di Indonesia masih cukup lebar.

#### 4. Daya Beli Masyarakat Menurun

Data Survei Konsumen yang dikeluarkan Bank Indonesia menunjukkan rasio konsumsi kelompok dengan pengeluaran di bawah Rp 5 juta mengalami penurunan. Penurunan terdalam dicatatkan oleh kelompok pengeluaran Rp 2,1 juta-3 juta, diikuti kelompok pengeluaran Rp 4,1 juta-5 juta.

Di tengah menurunnya daya beli ini, pemerintah malah berencana menaikkan pajak PPN untuk masyarakat. Dari semula 10 persen menjadi 12 persen.

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan mengungkapkan jika itu dilakukan dampaknya justru bakal semakin melemahkan daya beli masyarakat. Ujung-ujungnya sektor industri semakin terhimpit. Banyak pabrik yang bakal mengalami kebangkrutan. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) juga semakin meluas. Sementara pembukaan lapangan kerja baru semakin sedikit.

“Sementara bonus demografi yang seharusnya produktif akhirnya kan mereka kesulitan mencari kerja, jadi tidak produktif dan malah menjadi beban untuk negara. Jadinya Indonesia emas itu jadi mencemaskan sebenarnya,” kata Daniel.

#### 5. Peta Jalur Ekonomi Tidak Terarah

Dalam 10 tahun terakhir, pemerintah Indonesia fokus pada upaya hilirisasi mineral dan pembangunan infrastruktur. Tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun nyatanya, cara ini tidak cukup berhasil untuk tidak dikatakan gagal.

Daniel Johan berpandangan fokus pemerintah dua

### KATA PAKAR

Keadilan sosial dan kesamaan di mata hukum sangat penting dalam pemajuan demokrasi kita. Investor akan mempercayakan dan menempatkan investasinya ke negara-negara yang demokrasinya berjalan baik dan hukumnya memberikan keadilan.”

**A Muhaimain Iskandar,  
Wakil Ketua DPR RI**

“Pangan itu menjadi sangat penting karena dengan jumlah penduduk yang sangat besar, kalau ada krisis pangan bisa bahaya Indonesia itu. Jadi kita butuh road map untuk membangun kedaulatan pangan, sekaligus memperkuat nilai tambah. Jadi industrialisasi di bidang pangan itu harus kuat.”

**Daniel Johan, Politisi  
PKB. Wakil Ketua  
Komisi IV DPR RI**

“Jika KPPU memiliki taji yang bagus, dapat menghadapi oligarki untuk menjamin perwujudan pasal 33 dalam UUD 1945 kita,”

**Haedar Nashir, Ketua  
Umum Pengurus Pusat  
Muhammadiyah**

hal itu justru membuat potensi ekonomi Indonesia yang sebenarnya malah terabaikan. Misal saja sektor pertanian dan peternakan. Kedua sektor ini, menurut Daniel, sangat tidak berdaya saing. Akibatnya, ekonomi Indonesia terus berada dalam pertumbuhan yang stagnan. Padahal, jika dimanfaatkan dengan baik, Indonesia boleh jadi kekuatan pangan dan ekonomi terbesar dunia mengingat tanah di negeri ini amat subur.

## 6. Kebijakan Dipengaruhi Segelintir Pengusaha

Arah kebijakan ekonomi Indonesia juga cenderung tidak memihak pada masyarakat kecil. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Gadjah Mada, Dodi Ambardi mengungkapkan situasi ini terjadi lantaran banyak partai politik yang memiliki kursi di parlemen justru tersandera kepentingan ekonomi dari segelintir pengusaha.

Penyebabnya, kata Dodi, sekitar 70 persen keuangan partai untuk menjalankan roda organisasinya masih disumbang oleh kontributor, dalam hal ini pengusaha. Situasi ini, membuat arah kebijakan ekonomi, yang dibentuk anggota DPR atau menteri—yang notabene anggota partai—menjadi tidak sehat. Kontribusi para pengusaha kepada partai ini mengakibatkan anggota parlemen terpilih maupun pejabat di pemerintahan memiliki beban untuk menggolkan agenda masing-masing kontributornya.

“Yang dikorbankan akhirnya kesejahteraan buruh. Sederhananya seperti itu,” ungkap Dodi.

## 7. Pengusaha Untung, Rakyat Buntung

Belakangan, kebijakan pemerintah lebih banyak menguntungkan kalangan menengah atas dan para pengusaha. Misal saja soal penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sektor properti. Sampai Desember 2024, 100% PPN untuk pembelian properti bakal ditanggung pemerintah.

Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif tarif royalti hingga 0% kepada pengusaha batu bara yang melakukan gasifikasi batu bara. Harga batu bara yang dijual pengusaha ini juga bakal diberi insentif lain berupa penambahan nilai.

Sementara di sisi lain, masyarakat dibebani dengan penambahan PPN dari semula 10 persen menjadi 12 persen. Ada juga rencana pemotongan gaji atau penghasilan masyarakat untuk program Tabungan Perumahan Rakyat.

## 8. Tax Holiday dan Tax Allowance

Sejak 2011 hingga sekarang, pemerintah masih menerapkan insentif pajak berupa tax holiday. Di beberapa lokasi, seperti Kawasan Ekonomi Khusus, pengusaha tidak diminta membayar pajak. Di samping itu, ada juga tax allowance alias pengurangan nilai pajak bagi pemerintah yang mau berinvestasi di proyek-proyek strategis nasional.

# Mensiasati Paradoks Demokrasi (Ekonomi)

## 1. FOKUS SEKTOR PRODUKTIF

Daniel Johan berpandangan untuk mendorong ekonomi Indonesia saat ini pemerintah seharusnya lebih fokus mengembangkan industri yang punya nilai tambah tinggi. Salah satu di antaranya industri pangan. Caranya tidak hanya memberikan subsidi melainkan juga memberikan bantuan teknologi untuk digitalisasi.

Digitalisasi di sektor pangan diyakini Daniel bakal membuat sektor pertanian semakin berdaya saing. Dampak baiknya bukan hanya kepada petani yang semakin sejahtera melainkan Indonesia juga bisa memperkuat kedaulatan pangannya.

“Pangan itu menjadi sangat penting karena dengan jumlah penduduk yang sangat besar, kalau ada krisis pangan bisa bahaya Indonesia itu. Jadi kita butuh road map untuk membangun kedaulatan pangan, sekaligus memperkuat nilai tambah. Jadi industrialisasi di bidang pangan itu harus kuat,” ungkap Daniel.

## 2. INDUSTRI NASIONAL

Selain itu, pemerintah juga perlu mengubah politik kebijakan dan anggaran untuk lebih fokus pada upaya memperkuat sektor industri nasional, pangan, dan berpihak pada generasi muda. Pasalnya, saat ini Indonesia tengah memasuki era bonus demografi.

Jumlah penduduk usia muda jauh lebih banyak dibandingkan usia tua yang sudah tidak produktif.

Bukan waktunya lagi mengeluarkan banyak uang untuk pembangunan berskala besar yang tidak memberikan dampak langsung pada peningkatan daya saing ekonomi dan tidak berpihak kepada generasi muda. Kebijakan dan anggaran harus fokus pada upaya menjadikan generasi muda Indonesia menjadi produktif dan dapat diandalkan.

“Dengan anggaran terbatas, jangan menggunakan anggaran untuk hal-hal yang giant nggak jelas. Infrastruktur penting tapi jangan infrastruktur yang tidak punya dampak untuk meningkatkan daya saing ekonomi,” jelas Daniel.

## 3. PEMATANGAN DEMOKRASI DAN HUKUM

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar memandang upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia harus dimulai dari memperkuat demokrasi. Sebab, menurut Gus Muhaimin, demokrasi adalah napas suatu bangsa. Demokrasi yang matang akan menghasilkan keadilan sosial dan kesamaan di depan hukum.

Dengan hadirnya keadilan sosial dan kesamaan di mata hukum ini, sambung Gus Muhaimin, barulah ekonomi akan

maju. Itu karena investor akan cenderung mempercayakan dan menempatkan investasinya ke negara-negara yang demokrasinya berjalan baik dan hukumnya memberikan keadilan.

“Dengan cara demokrasi yang matang, insyaallah investor akan masuk Indonesia dan bisa membangun serta rakyat kita mendapatkan pekerjaan, penghasilan, kemakmuran, dan kesejahteraan,” tutur Gus Muhaimin di Kabupaten Badung, Bali.

#### 4. INOVASI ATASI KETIMPANGAN

Gus Muhaimin mengatakan ketimpangan ekonomi tidak bisa diselesaikan secara parsial maupun tambal sulam. Wakil Ketua DPR ini mengingatkan perlu adanya formula dan inovasi baru untuk memangkas ketimpangan yang ada. Mulai dari perubahan paradigma kebijakan pembangunan, upaya perombakan kelembagaan yang matang, pembangunan infrastruktur, serta insentif yang mendukung pengawasan praktik ekonomi di lapangan.

“Satu hal yang kita tidak bisa mungkiri bahwa ketimpangan ekonomi masih menjadi paradoks yang menyertai dalam proses pembangunan bangsa ini. Mengatasinya tidak bisa parsial, tapi perlu inovasi dan terobosan baru,” ujar Gus Imin.

#### 5. SISTEM PEMBIAYAAN PARTAI

Dodi Ambardi mengungkapkan untuk mendukung arah kebijakan yang memihak kepada masyarakat, sistem pembiayaan partai juga perlu diubah. Perlu dicari alternatif agar partai

tetap bisa mendapatkan dana untuk menjalankan organisasi tanpa harus mengandalkan dana dari kontributor ataupun pengusaha. Sumbernya, kata Dodi, boleh jadi dari pemerintah.

Cara lainnya, dengan mempermudah syarat pendirian partai yang saat ini harus memiliki kantor di 38 provinsi di Indonesia. Kemudahan syarat ini diharapkan dapat meringankan partai dalam membiayai sayap-sayap partainya di daerah.

“Tapi semua pasti ada plus-minusnya. Cuma kita harus melihat mana yang lebih banyak mudhorotnya,” pungkas Dodi.

#### 6. PENGUATAN PENGAWASAN

Penguatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha perlu dilakukan untuk memastikan iklim bisnis di Indonesia berkeadilan. Bukan hanya adil untuk penguasa ekonomi yang memiliki modal besar, tapi juga adil bagi pengusaha kecil alias Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan penguatan KPPU dapat menetralsir oligarki ekonomi yang saat ini kian sulit dikontrol. Tanpa KPPU yang kuat, sulit bagi negara untuk menegakkan ekonomi yang berkeadilan.

“Jika KPPU memiliki taji yang bagus, dapat menghadapi oligarki untuk menjamin perwujudan pasal 33 dalam UUD 1945 kita,” jelas Haedar.

# Potensi Pajak Kekayaan untuk Demokratisasi Ekonomi



**Oleh A.H. Maftuchan**  
(Direktur Eksekutif  
Prakarsa)

Sejak tahun 2021, the Prakarsa bersama jejaring Tax-Justice Network di tingkat internasional mengampanyekan penerapan pajak kekayaan secara global. Implementasi pajak kekayaan semakin menemukan relevansinya di tengah krisis ekonomi global yang diakibatkan krisis iklim, perang, dampak pandemi Covid-19, dan pertarungan dagang antarnegara.

Di tengah situasi sulit tersebut, ironisnya, justru jumlah orang superkaya HNWI (high-net worth individual) bertambah dan jumlah kekayaan HNWI semakin meningkat pada masa krisis. Di Indonesia HNWI meningkat, jumlah orang Indonesia dengan nominal kekayaan di atas US\$ 1 juta hampir 172 ribu orang pada tahun 2020, meningkat sebesar 62 persen dibandingkan tahun 2019. Forbes (2022) mencatat total gabungan aset bersih 50 orang terkaya di Indonesia meningkat 22 persen, dari US\$ 133 miliar (sekitar Rp 1.938 triliun) pada tahun 2020 menjadi US\$ 162 miliar (sekitar Rp 2.324 triliun)

pada tahun 2021, hampir setara dengan total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia tahun 2020.

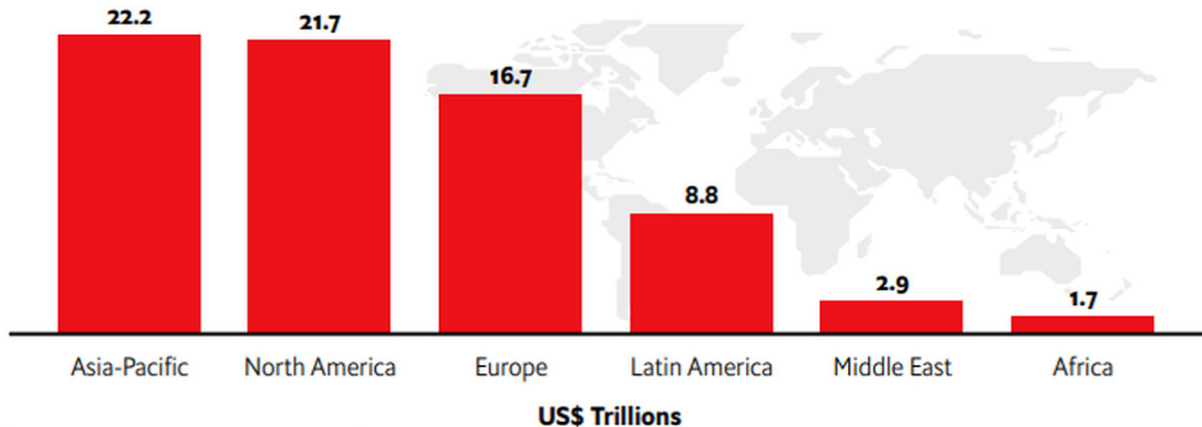
Pajak kekayaan menjadi opsi sumber pendapatan domestik dan dapat mendongkrak pendapatan negara secara signifikan guna mendanai program sosial, menciptakan pemerataan ekonomi dan mendanai program pembangunan lainnya. Perkiraan yang disajikan oleh Universitas Greenwich, Prancis, menunjukkan bahwa pajak progresif atas kekayaan bersih dapat menghasilkan pendapatan antara 3 persen dan 10,8 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Dengan asumsi sekitar 4.600 orang Indonesia memiliki kekayaan di atas US\$ 10 juta atau Rp 155 miliar (kekayaan yang menjadi batasan tingkat pajak kekayaan), maka simulasi penghitungan tax-rate/ tax-brackett dapat disimulasikan dalam 4 opsi:



**Figure 1: HNWI<sup>\*</sup> US\$74trn**

Total holdings of HNWI by region (US\$trn)



Source: Capgemini (\*more than US\$50m in assets)

Nilai kekayaan individu super kaya (High Net Worth Individual/HNWI) berdasarkan kawasan

1. Model 1 (Flat 1%): Potensi penerimaan pajak sebesar Rp 54 triliun. Dengan menggunakan data Forbes, olahan penelitian mengestimasi penerimaan pajak sekitar Rp 27,9 triliun dari 100 orang terkaya Indonesia. Adapun sisanya akan berkontribusi sejumlah Rp 26,2 triliun. Apabila disandingkan dengan realisasi penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2021, pajak kekayaan model ini akan berkontribusi sebesar 4,23 persen dari total penerimaan pajak.

2. Model 2 (Flat 2%): Potensi penerimaan sebesar Rp 86,6 triliun. Golongan 100 orang terkaya akan menyumbang sebesar Rp 55,7 triliun dan sisanya akan menyumbang sebesar Rp 30,9 triliun. Melalui hasil ini, pajak kekayaan senilai 6,78 persen dari realisasi penerimaan pajak pada tahun 2021.

3. Model 3 (Progresif 1% - 2%): Potensi penerimaan sebesar Rp 78,5 triliun, di

mana 100 orang terkaya menyumbang Rp 60,2 triliun dan yang lain akan membayar Rp 18,4 triliun. Jumlah tersebut senilai 6,15 persen dari realisasi penerimaan pajak tahun 2021.

4. Model 4 (Progresif 1,5% - 4%): Potensi penerimaan sebesar Rp 155,3 triliun. Golongan 100 orang terkaya membayar Rp 123,4 triliun dan golongan di bawahnya menyumbang sebesar Rp 31,9 triliun. Hasil model ini setara 12,15 persen dari realisasi penerimaan pajak Indonesia tahun 2021.

Pajak kekayaan dikenakan terhadap kekayaan bersih dari total gabungan aset, termasuk tabungan bank, deposito, saham, waran, surat berharga, sukuk, logam mulia, donasi, warisan, mata uang kripto, dan hibah. Pajak kekayaan dikenakan sebanyak satu kali dalam setahun kepada wajib pajak atau pihak yang mewakili keluarga HNWI.

# Solusi Kendalikan Oligarki

ANALISIS TIM REDAKSI RUMAH POLITIK KESEJAHTERAAN (RPK) | Ngarto Februna (Peneliti RPK)

**T**ipologi oligarki di Indonesia sangat kompleks dan melibatkan interaksi antara kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Di Indonesia, terbentuknya oligarki modern terjadi selama ekspansi kapitalisme pasar di bawah pemerintahan otoriter Soeharto (1966-1998). Proses tersebut membuka jalan bagi aliansi birokrat yang berkuasa dengan perusahaan-perusahaan besar untuk mengumpulkan kekayaan dan kekuasaan.

Selama era Orde Baru Soeharto, menurut analisis politik Azyumardi Azra, berkembang “oligarki finansial” yang disebut “cukong”, yang terdiri dari orang-orang superkaya yang terkait dengan elite politik. Pada era reformasi, terjadinya liberalisasi politik

dan banyaknya pemilihan umum, semakin memperkuat posisi mereka, banyak di antaranya beralih ke peran politik. Penelitian oleh Eve Warburton dari Universitas Nasional Australia menunjukkan bahwa di bawah Presiden Joko Widodo, tokoh-tokoh bisnis telah memperoleh pengaruh politik yang signifikan, yang memperkuat dominasi oligarki. Peran mereka meningkat dalam mengelola lembaga-lembaga negara dan hal itu kini dianggap sah. Berikut ciri utama oligarki di Indonesia.

## 1. MENGUASAI SEKTOR-SEKTOR EKONOMI

Kelompok oligarki menguasai sektor-sektor ekonomi utama seperti sumber daya alam, perbankan, tanah, telekomunikasi, media, dan infrastruktur,

yang memungkinkan mereka memengaruhi kebijakan politik dan sosial untuk melayani kepentingan mereka.

Dalam sumber daya alam, oligarki mendominasi perusahaan minyak, gas, dan mineral, yang sering menimbulkan konflik kepentingan. Oligarki di industri pertambangan telah mampu memengaruhi proses politik dengan mendukung kandidat presiden yang mereka yakini dapat mengakomodasi kepentingan mereka dengan baik. Hal ini telah menyebabkan “kemunduran demokrasi” dan “perubahan tidak liberal” (illiberal turn) di Indonesia.

Kehadiran mereka yang signifikan dalam perbankan memungkinkan mereka memengaruhi kebijakan keuangan dan membatasi akses kredit bagi usaha kecil, sehingga menghambat persaingan dan inovasi. Oligarki juga menguasai lahan pertanian dan sumber daya hutan, yang memengaruhi penggunaan lahan dan keberlanjutan. Mereka memonopoli proyek infrastruktur besar, yang mengakibatkan akses yang tidak merata dan kontrol pembangunan daerah yang signifikan.

## 2. MENGAJAR DI LEMBAGA POLITIK

Meskipun sistem politik Indonesia masih tergolong demokrasi, oligarki berkontribusi terhadap erosi norma dan lembaga demokrasi secara bertahap. Oligarki telah mengajar dalam lembaga politik, dengan beberapa aktor anti-demokrasi kini menjadi bagian dari sistem tersebut.

Oligarki memengaruhi kebijakan pemerintah dengan cara antara lain keterlibatan dalam proses legislasi, seperti pembuatan undang-undang, mendorong regulasi yang menguntungkan bagi industri yang mereka kuasai. Dalam kasus ini, Ary Hermawan, peneliti di The University of Melbourne, mencatat kelompok oligarki telah melakukan berbagai upaya untuk melemahkan lembaga-lembaga demokrasi demi kepentingan politik dan ekonomi mereka. Mereka mendukung pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU-KPK) yang melemahkan lembaga antirasuah tersebut. Ary mengatakan para oligarki menyambut baik pengesahan UU yang kontroversial itu, kemungkinan

.....

Para oligarki menyambut baik pengesahan UU yang kontroversial itu, kemungkinan besar karena KPK dianggap sebagai ancaman bagi kepentingan mereka. Ary berpendapat, para oligarki sektor pertambangan, yang beberapa di antaranya duduk di kabinet Jokowi, mendukung UU Cipta Kerja (2020) karena aturan tersebut cenderung mengakomodasi kepentingan mereka.

.....

Di Indonesia, ekonomi digital diproyeksikan akan tumbuh hingga 8 kali lipat dari 4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2020 menjadi sekitar 34% pada 2030, mencapai Rp 4.531 triliun. Hal ini menunjukkan potensi besar pertumbuhan sektor digital di tengah tantangan ekonomi.

besar karena KPK dianggap sebagai ancaman bagi kepentingan mereka. Ary berpendapat, para oligarki sektor pertambangan, yang beberapa di antaranya duduk di kabinet Jokowi, mendukung UU Cipta Kerja (2020) karena aturan tersebut cenderung mengakomodasi kepentingan mereka.

Para pelaku bisnis kini mendominasi cabang-cabang eksekutif dan parlementer pemerintah, serta partai-partai politik, tim kampanye, dan dalam beberapa kasus “staf khusus” para menteri. Para pebisnis juga makin banyak yang terjun ke dunia politik dengan menjadi kepala daerah seperti wali kota, bupati, dan gubernur serta legislator. KPK melaporkan bahwa 25 persen kandidat dalam pemilihan kepala daerah 2020 sebelumnya berkarier sebagai pebisnis. Menurut majalah Tempo, 45 persen legislator nasional pada masa jabatan 2019-2024 adalah pebisnis.

Kelompok oligarki secara signifikan memengaruhi pemilihan presiden dan legislatif Indonesia melalui pendanaan kampanye, yang menciptakan ketergantungan pada kepentingan mereka di antara kandidat terpilih. Mereka mendukung kandidat yang sejalan dengan tujuan bisnis mereka, memastikan kebijakan yang menguntungkan. Setelah pemilihan,

## REKOMENDASI SOLUSI

1. Melaksanakan reformasi demokrasi untuk meningkatkan transparansi keuangan, memastikan pemilihan umum yang adil, dan mengendalikan kekuatan ekonomi besar, memperkuat hak-hak sipil dan liberalisasi politik.

2. Reformasi struktural dan kebijakan inklusif untuk mengurangi kekuatan oligarki dan mendorong demokrasi yang lebih kuat melalui peningkatan pengawasan bisnis, menciptakan peluang bagi wirausahawan, dan mendorong partisipasi publik dalam proses legislasi.

oligarki ini dapat menekan legislator yang didukung untuk meloloskan undang-undang yang menguntungkan.

Beberapa oligarki ekonomi-politik menguasai media dan telekomunikasi dan memanfaatkannya untuk membentuk opini publik, mengontrol narasi dalam masyarakat, mendukung kepentingan politik atau bisnis tertentu. Banyak juga di antara mereka memiliki hubungan dengan tokoh militer yang dekat dengan elite politik. Meskipun kontrol militer atas politik telah berkurang sejak Reformasi 1998, beberapa tokoh militer masih memiliki pengaruh, terutama melalui hubungan dengan elite politik.

## OLIGARKI DI NEGARA LAIN

Oligarki Rusia terdiri dari sekelompok kecil elite kaya yang memusatkan kekuasaan politik dan ekonomi untuk keuntungan mereka sendiri. Sistem ini muncul dari privatisasi tahun 1990-an,

yang berkembang di bawah Presiden Vladimir Putin menjadi kerangka kerja yang lebih terkendali. Setelah pembubaran Uni Soviet pada tahun 1991, aset negara diprivatisasi, yang menguntungkan orang dalam dan menyebabkan munculnya oligarki selama masa kepresidenan Boris Yeltsin. Para oligarki ini mendominasi sektor-sektor utama seperti energi dan keuangan, yang menciptakan ketimpangan yang signifikan dan mengurangi partisipasi politik publik. Lanskap politik telah dimanipulasi untuk menguntungkan elite penguasa, merusak persaingan yang adil dan menekan oposisi.

Naiknya Vladimir Putin ke tampuk kekuasaan pada tahun 1999 menandai pergeseran ke arah sentralisasi. Ia menerapkan reformasi untuk mengurangi kekuasaan oligarki dan menegaskan kembali kendali negara atas sektor-sektor penting, dengan mengandalkan personel keamanan

3. Advokasi sosial untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak buruk struktur oligarki terhadap masyarakat dan lingkungan. Tujuannya adalah untuk membantu warga negara memahami peran mereka dan tujuan negara, serta mendorong partisipasi politik rakyat.

4. Advokasi kebijakan untuk mendorong amandemen konstitusi yang menuntut pertanggungjawaban oligarki atas pengabaian hak warga negara dalam pengelolaan lingkungan.

dan militer untuk mengonsolidasikan otoritas. Banyak oligarki yang dikooptasi atau disingkirkan, sehingga menghasilkan sistem oligarki yang lebih terstruktur yang memungkinkan Kremlin mempertahankan kendali ekonomi yang lebih ketat.

Di bawah Putin, oligarki yang mendukung negara diberi penghargaan, sementara mereka yang menentanginya menghadapi konsekuensi. Meskipun ada sanksi Barat, oligarki Rusia tetap kaya dan sebagian besar mendukung Putin, dengan banyak yang tinggal di luar negeri. Mereka telah berupaya memanfaatkan forum internasional, seperti COP27, untuk melobi pencabutan sanksi.

Oligarki Venezuela, khususnya faksi-faksi politik dan ekonominya, memiliki dinamika kekuasaan terpusat yang didominasi oleh kelompok-kelompok elit yang berpihak pada pemerintah selama masa jabatan Hugo Chávez dan Nicolás Maduro. Para pemimpin ini, yang sering kali berlatar belakang

militer, secara signifikan memengaruhi kebijakan nasional. Beberapa individu dan organisasi mengendalikan sumber daya minyak vital negara tersebut, yang memungkinkan oligarki untuk memengaruhi keputusan politik dan memperkuat dominasi mereka.

Kekuasaan oligarki semakin diperkuat oleh kontrol media, dengan para pemimpin militer memegang posisi-posisi penting di pemerintahan yang menggabungkan otoritas politik dan militer. Hal ini sering kali menyebabkan terabaikannya kebutuhan rakyat, yang mengakibatkan sistem pemerintahan yang memprioritaskan kepentingan segelintir orang di atas populasi yang lebih luas, yang memperburuk krisis bagi rakyat Venezuela.

## REKOMENDASI SOLUSI

5. Transformasi lanskap ekonomi untuk mengatasi ketidakseimbangan kekuasaan dan reformasi lembaga politik untuk mengurangi biaya kampanye.

6. Memperkuat gerakan sosial, memberdayakan politisi akar rumput, mendidik kaum muda, dan meningkatkan penegakan hukum bagi masyarakat terpinggirkan menuju masyarakat yang lebih adil.

## 5 Negara Berhasil Menerapkan Demokratisasi Ekonomi untuk Mengatasi Oligarki

Nomor	Negara	Mekanisme/Regulasi/Lembaga	Hasil
1	Korea Selatan	Reformasi meningkatkan transparansi dan kompetisi dalam ekonomi; mengurangi kekuasaan chaebol (konglomerat besar) dan penguatan regulasi yang memperkuat basis ekonomi yang lebih adil dengan membuat/melaksanakan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Antimonopoli;</li> <li>2. Komisi Persaingan Usaha (KFTC)</li> <li>3. Undang-Undang Perlindungan Konsumen</li> </ol>	Berhasil memperkuat basis ekonomi yang lebih adil.
2	Argentina	Kebijakan mendukung UMKM dan koperasi, memperketat monitoring perusahaan besar; Pajak kekayaan tarif progresif untuk mendanai respons terhadap pandemi Covid-19. Undang-Undang Pajak Kekayaan (Ley de Aporte Solidario; 2020)	Berhasil mengurangi dominasi oligarki di sektor ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif.
3	Selandia Baru	Kebijakan mendemokratisasi proses pengambilan keputusan ekonomi dan mengurangi dominasi korporasi besar melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak Progresif;</li> <li>2. Undang-Undang Anti-Korupsi;</li> <li>3. Regulasi Kepemilikan Aset;</li> <li>4. Regulasi Laporan Keuangan;</li> </ol>	Berhasil membantu memperkuat keadilan sosial dan ekonomi.
4	Taiwan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Liberalisasi politik dan penguatan hak-hak sipil;</li> <li>2. Undang-Undang Antimonopoli;</li> <li>3. Transparansi Keuangan;</li> <li>4. Undang-Undang Anti-Korupsi;</li> <li>5. Dukungan untuk Koperasi dan UKM;</li> <li>6. Pengawasan Sektor Keuangan.</li> </ol>	Berhasil membantu mengurangi dampak oligarki politik dan ekonomi yang ada sebelumnya.
5	Chili	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk dan memperkuat lembaga-lembaga pengawas independen;</li> <li>2. Undang-Undang Antimonopoli (bertujuan mengurangi dominasi perusahaan besar dan memberikan kesempatan lebih bagi UMKM);</li> <li>3. Komisi Konstitusi (membuat konstitusi baru)</li> <li>4. Kongres Nasional Chili (membuat dan mengesahkan UU baru).</li> </ol>	Berhasil mengurangi pengaruh oligarki dan berdampak positif terhadap ekonomi secara keseluruhan.

# Pajak Kekayaan Bisa Menopang Program Kesejahteraan



OLEH: *HERNI RAMDLANINGRUM*  
*Peneliti PRAKARSA*

**S**istem perpajakan Indonesia menyimpang dari prinsip-prinsip redistribusi yang adil. Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp 100 triliun secara tidak proporsional, seperti yang diungkapkan Kementerian Keuangan baru-baru ini, menguntungkan orang kaya. Karena itu, Kementerian Keuangan menyerukan perbaikan sistem perpajakan untuk memastikan keadilan. Pemungutan pajak harus adil, berdasarkan kemampuan wajib pajak, dan didasarkan pada kerangka hukum yang jelas, yang menjamin kepastian, kemudahan pembayaran, dan efisiensi (Adam Smith, 2007, dalam Azmiya dan Rusydiasas, 2013).

Pajak harus proporsional dengan pendapatan, memberikan manfaat bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, diterapkan secara adil, dan tidak melebihi nilai obyek kena pajak. Prinsip-prinsip ini penting untuk sistem pajak yang efektif dan adil yang mendorong pemerataan sosial (W.J. Langen, 2022).

Agar selaras dengan prinsip perpajakan yang adil diperlukan penerapan sistem pajak progresif untuk orang kaya. Kebutuhan penerapan sistem pajak progresif ini sangat mendesak. Alasannya, pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto mempunyai program yang membutuhkan dana besar, yaitu



makan siang bergizi gratis bagi siswa untuk mengatasi kekurangan gizi yang menghambat pembelajaran dan meningkatkan kualitas pendidikan. Pendanaan program tersebut antara lain bisa bersumber dari penerimaan pajak progresif.

## Program Makan Siang Gratis di Beberapa Negara

Penelitian menunjukkan program makan siang gratis bisa meningkatkan hasil akademik, mengurangi kerawanan pangan, mengatasi obesitas, dan mengurangi perilaku negatif di sekolah, mendorong inklusi sosial, dan mengurangi stigma kemiskinan. Program makan siang gratis juga bisa meningkatkan prestasi akademik, kesehatan, dan ekonomi keluarga (Budiantoro, 2024).

Sejumlah negara telah mengadopsi berbagai model pendanaan untuk inisiatif makan siang gratis di sekolah. Di AS, Program Makan Siang Sekolah Nasional (NSLP) didanai pemerintah federal. Swedia menyediakan makan siang gratis yang didanai pajak daerah. Program Gakko Kyushoku di Jepang menerima subsidi nasional dan daerah, dengan kontribusi orang tua, dan Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) di Brasil didanai pemerintah federal. Program serupa di India didukung pemerintah pusat dan negara bagian. Di Inggris, Makan Sekolah Gratis (FSM) didanai oleh pemerintah pusat untuk keluarga berpenghasilan rendah.

Di Filipina, Program Pemberian Makanan Berbasis Sekolah (SBFP), yang dikelola Kementerian Pendidikan bekerja sama dengan berbagai organisasi, telah menanggulangi kekurangan gizi sejak tahun 2019, yang berdampak positif pada 13,2% anak usia sekolah.

## DATA & ANGKA

pada tahun 2020, pajak kekayaan Swiss menyumbang 3,6% dari total pendapatan negara tersebut. Pajak kekayaan perusahaan Luksemburg menyumbang 3% dari PDB-nya. Argentina juga memberlakukan pajak kekayaan satu kali selama pandemi COVID-19, yang menghasilkan lebih dari ARS 240 miliar (sekitar IDR 37,2 triliun) dalam setahun dari sekitar 10.000 pembayar pajak. Contoh-contoh ini menunjukkan potensi pajak kekayaan untuk berkontribusi secara signifikan terhadap keuangan publik.

.....

di Asia Tenggara, tarif pajak atas pendapatan aktif berkisar antara 5% hingga 35%, sedangkan tarif pendapatan pasif jauh lebih rendah, berkisar antara 0,1% hingga 20%. Ketimpangan ini merusak prinsip keadilan pajak, di mana mereka yang berpenghasilan lebih tinggi harus menanggung beban pajak yang lebih tinggi secara proporsional.

## Pajak Kekayaan untuk Mendanai Program Makan Siang Gratis

Di Indonesia, salah satu pertanyaan penting terkait program makan siang gratis di sekolah adalah sumber pendanaan. Gagasan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk inisiatif ini menuai kritik, karena dapat membebani anggaran sekolah dan berdampak negatif pada siswa dan guru jika dana BOS tidak ditingkatkan. Karena itu, diperlukan sumber pendanaan alternatif. Pajak kekayaan jadi alternatif pendanaan program ini sekaligus mempromosikan keadilan pajak. Hal ini mengharuskan orang-orang terkaya untuk berkontribusi secara lebih adil, sejalan dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan distributif, dan memastikan sumber daya publik bermanfaat bagi mereka yang paling membutuhkan.

Pajak kekayaan dikenakan atas kekayaan bersih seseorang, dihitung sebagai total aset dikurangi kewajiban. Pajak ini menargetkan individu dengan kekayaan di atas ambang batas tertentu untuk menghasilkan pendapatan pemerintah. OECD (2022) mendefinisikannya sebagai nilai pasar aset yang dimiliki dikurangi kewajiban, dengan cakupan yang bervariasi tergantung pada bagaimana

Di salah satu negara di Kawasan Asia Tenggara, program makan siang gratis telah dilakukan oleh Filipina sejak 2019 melalui program yang disebut dengan Pemberian Makan di Sekolah (School-Based Feeding Program/SBFP). Tujuannya adalah untuk mengatasi masalah stunting atau gizi buruk yang terjadi pada 13.2% populasi usia anak sekolah. Dalam pelaksanaannya, SBFP dilakukan oleh Departemen Pendidikan Filipina (DepEd) yang bermitra dengan berbagai organisasi.

kekayaan didefinisikan.

Pajak kekayaan menerapkan tarif pada kekayaan bersih Individu Berkekayaan Bersih Tinggi (HNWI), biasanya mereka yang memiliki aset likuid melebihi Rp 15 miliar per tahun. HNWI mengacu pada individu yang sangat kaya, dan ambang batas umumnya hanya mencakup aset likuid, tidak termasuk tempat tinggal utama dan barang tahan lama. Rumus menghitung kekayaan bersih: Kekayaan Bersih = Total Nilai Aset – Total Kewajiban. Misalnya, jika seseorang memiliki aset senilai Rp 15 miliar dan kewajiban Rp 3,75 miliar, kekayaan bersihnya akan menjadi Rp 11,25 miliar, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai HNWI.

## Pajak Kekayaan sebagai Solusi Mengatasi Ketimpangan Sosial

Pajak kekayaan akan mendorong orang kaya untuk berinvestasi dalam kegiatan produktif, yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi



📷 Perkampungan padat penduduk dengan latar belakang gedung bertingkat di Jakarta, Jumat (23/12/2022). Pemerintah akan melanjutkan program perlindungan sosial untuk mendorong tingkat kemiskinan pada 2023 menurun, di kisaran 7,5-8,5 persen, tingkat pengangguran terbuka sekitar 5,3-6,0 persen, dan perbaikan ketimpangan (gini ratio) menjadi 0,375-0,378. | KOMPAS/HERU SRI KUMORO

jangka panjang, bukan sekadar akumulasi pribadi. Selain itu, pajak kekayaan sangat penting untuk mengatasi beban pajak yang tidak setara antara pendapatan aktif dan pasif. Sementara pekerja memperoleh pendapatan aktif melalui kerja, individu dengan kekayaan bersih tinggi sering memperoleh kekayaan dari sumber pasif seperti investasi.

Sebagian besar negara menggunakan sistem pajak penghasilan progresif, mengenakan pajak atas penghasilan yang lebih tinggi dengan tarif yang lebih tinggi, tetapi penghasilan aktif dan pasif sering dikenakan pajak yang berbeda. Penghasilan pasif biasanya dikenakan pajak dengan tarif akhir yang lebih rendah, sehingga menciptakan disparitas. Di Asia Tenggara, misalnya,

penghasilan aktif dikenakan pajak antara 5% dan 35%, sedangkan penghasilan pasif dikenakan pajak 0,1% hingga 20%. Ketidakseimbangan ini menantang prinsip keadilan pajak, yang menyatakan bahwa orang yang berpenghasilan tinggi harus membayar pajak dalam porsi lebih besar.

Steven M. Sheffrin (2013) menekankan bahwa keadilan pajak memerlukan keadilan vertikal, di mana beban pajak mencerminkan pendapatan dan kekayaan pembayar pajak. Kebijakan pajak kekayaan sangat penting untuk keadilan pajak, memastikan orang kaya berkontribusi secara adil. Negara-negara seperti Swiss dan Luksemburg telah berhasil menerapkan pajak kekayaan, menghasilkan pendapatan yang signifikan—3,6%

dari total pendapatan Swiss dan 3% dari PDB Luksemburg. Argentina juga memberlakukan pajak kekayaan satu kali selama pandemi Covid-19, mengumpulkan lebih dari ARS 240 miliar (sekitar Rp 37,2 triliun) dari sekitar 10.000 pembayar pajak. Hal ini merupakan potensi pajak kekayaan untuk meningkatkan keuangan publik.

Para penentang pajak kekayaan mengkhawatirkan pelarian modal, berkurangnya insentif investasi, dan meningkatnya penghindaran pajak, khususnya di surga pajak. Negara-negara yang mempertimbangkan pajak kekayaan dapat belajar dari negara lain untuk menciptakan kerangka kerja yang efektif, termasuk basis pajak yang lebih luas, biaya penilaian yang

lebih rendah, dan langkah-langkah untuk mencegah penghindaran melalui relokasi. Standar transparansi pajak yang ditingkatkan sangat penting untuk keberhasilan implementasi, yang membantu mengurangi pelarian modal dan penghindaran pajak.

Potensi pajak kekayaan yang dikembangkan oleh Wealth Tax Commission di Inggris (Advani et al., 2021) menawarkan lima skenario yaitu Sekali waktu, Pajak Tetap, Moderat Progresif, Tinggi Progresif, Batas Kekayaan Progresif. Di beberapa negara, penerapan pajak kekayaan menggunakan metode yang berbeda untuk menentukan tarif dan basis pajak, beberapa contoh adalah sebagai berikut:

Negara	Tingkat Pajak	Basis Pajak
Kolombia	0,5% – 1%	Kekayaan bersih lebih dari USD 1,3 juta atau IDR 19,2 miliar
Prancis	0,5% – 1,5%	Aset properti bersih individu lebih dari €1,3 juta atau IDR 20,2 miliar
Norwegia	0,7% di tingkat kota dan 0,25% di tingkat nasional	Nilai pasar wajar aset dikurangi utang; pajak dikenakan pada kekayaan di atas NOK1,5 juta (USD 180.000 atau IDR 2,6 miliar) untuk wajib pajak tunggal/tidak menikah dan NOK3 juta (USD 360.000 atau IDR 5,2 miliar) untuk pasangan menikah
Spanyol	0,2% – 3,5%	Bervariasi tergantung wilayah; umumnya, nilai aset dikurangi nilai utang. Wilayah memiliki otonomi dalam menentukan nilai pembebasan pajak
Swiss	0,05% - 4,5% tergantung kanton (provinsi) dan kota	Aset kotor (nilai pasar wajar) dikurangi utang
Argentina	0,5% – 2,25%	Total nilai aset di atas ARS 3 juta (USD 24.410 atau IDR 361 juta)
Filipina	1% – 3%	Total aset di atas PHP 1 miliar (USD 18,7 juta atau IDR 277 miliar)

📷 Potensi pajak kekayaan yang dikembangkan oleh Wealth Tax Commission di Inggris (Advani et al., 2021) menawarkan lima skenario yaitu Sekali waktu, Pajak Tetap, Moderat Progresif, Tinggi Progresif, Batas Kekayaan Progresif. Di beberapa negara, penerapan pajak kekayaan menggunakan metode yang berbeda untuk menentukan tarif dan basis pajak,

## TIPOLOGI OLIGARKI BERBAGAI NEGARA

Dimensi/Aspek	Rusia	Venezuela	Indonesia
1. Konsentrasi Kekayaan	Pasca-bubaranya Uni Soviet. Menumpuk kepada beberapa orang dan grup	2000-an-Sekarang. Pemusatan ekonomi pada sekelompok kecil elite.	Dimulai sejak Orde Baru. Kekayaan Menumpuk di beberapa orang dan kelompok.
2. Dampak ke Partai Politik	Multipartai ada secara formal tetapi pemilu dikendalikan penuh	Multipartai tapi oligarki mengendalikan partai politik	Multipartai, tetapi pengaruh berlebihan kepada parpol.
3. Pengendalian Media Massa	Media massa dikendalikan ketat	Kontrol media oleh elite pro-pemerintah.	Media massa dipengaruhi dengan intensif.
4. Pengaruh kepada Sistem Hukum dan Pengadilan	Sistem hukum tidak berjalan. Pengadilan tidak mandiri. Pro forma	Politikisasi Peradilan: Sistem peradilan sering dipengaruhi kepentingan politik. Oligarki sering mengintervensi proses hukum	Campur tangan kepada hukum dan pengadilan
5. Pengaruh kepada UU dan Kebijakan Publik	Dominan. Kendali penuh	Oligarki dapat memengaruhi proses legislatif. Perundang-undangan cenderung berpihak pada kelompok politik tertentu.	Pengaruh maksimum termasuk ke eksekutif dan legislatif
6. Pajak Kekayaan (Wealth Tax)	Tidak ada	Tidak ada.	Tidak ada
7. Rezim Pajak	Regresif; Lebih banyak memberi beban kepada kelas menengah dan konsumen	Pajak yang Tidak Proporsional: lebih membebani kelas menengah; oligark dan elite ekonomi menghindari kewajiban pajak.	Regresif Lebih banyak memberi beban kepada kelas menengah dan konsumen
8. Derajat Belanja Sosial (Social Spending)	Rendah	Sedang	Rendah

**Sebagian besar negara menggunakan sistem pajak penghasilan progresif, mengenakan pajak atas penghasilan yang lebih tinggi dengan tarif yang lebih tinggi, tetapi penghasilan aktif dan pasif sering dikenakan pajak yang berbeda. Penghasilan pasif biasanya dikenakan pajak dengan tarif akhir yang lebih rendah, sehingga menciptakan disparitas. Di Asia Tenggara, misalnya, penghasilan aktif dikenakan pajak antara 5% dan 35%, sedangkan penghasilan pasif dikenakan pajak 0,1% hingga 20%. Ketidakseimbangan ini menantang prinsip keadilan pajak, yang menyatakan bahwa orang yang berpenghasilan tinggi harus membayar pajak dalam porsi lebih besar.**

Di Indonesia, pajak kekayaan dapat meningkatkan program pemerintah secara signifikan. Studi PRAKARSA menyajikan skema pendapatan dengan empat model: dua tarif tetap (1% dan 2%) dan dua tarif progresif (1%-2% dan 1,5%-4%). Dengan menggunakan data dari 100 orang terkaya Indonesia yang dilaporkan Forbes pada tahun 2021 dan statistik tentang Individu Berkekayaan Bersih Tinggi (HNWIs) dengan aset lebih dari US\$ 1 juta atau Rp 15 miliar, yang berjumlah sekitar 21.400 orang, studi tersebut mengantisipasi jumlah ini akan meningkat lebih dari dua kali lipat pada tahun 2025.

Simulasi memperkirakan 4.600 orang melampaui ambang batas pajak kekayaan US\$ 10 juta. Pendapatan potensial dihitung menggunakan nilai median dari setiap kelompok pajak. Misalnya, dalam kelompok Rp 144 miliar hingga Rp 216,5 miliar, pendapatan model 1 didasarkan pada nilai median Rp 180,5 miliar, disesuaikan dengan kekayaan tidak kena pajak, dan

dikalikan dengan perkiraan 1.700 wajib pajak.

Dalam beberapa simulasi telah dilakukan, menunjukkan bahwa pajak kekayaan di Indonesia dapat secara efektif mendukung program makan siang bergizi gratis untuk siswa, yang memungkinkan anggaran pendidikan untuk difokuskan pada infrastruktur, kesejahteraan guru, dan pengembangan keterampilan siswa.

Temuan ini menunjukkan bahwa pajak kekayaan, baik tetap maupun progresif, dapat mendanai program makan siang secara signifikan. Tarif progresif sebesar 1% hingga 2% dapat menutupi hingga 50% dari anggaran, sedangkan model keempat dapat sepenuhnya membiayai makan siang gratis untuk anak sekolah, balita, dan ibu hamil, dengan perkiraan anggaran tahun pertama sebesar Rp 100 triliun hingga Rp 120 triliun.

## Pajak Kekayaan di Negara-negara OECD

Negara	Nama Pajak	Keterangan
<b>Swiss</b>	Pajak kekayaan bersih	Negara dengan sistem perpajakan terbaik keempat di OECD ini sudah lebih dulu mengimplementasi pajak kekayaan di tahun 1840 sebagai sumber utama pendapatan. Semua kanton (negara bagian) di Swiss dikenai pajak kekayaan dengan tarif 0,05% - 0,45%, berdasarkan saldo aset bruto di seluruh dunia dikurangi utang. Aset-aset yang dilaporkan ialah saldo rekening bank, obligasi, saham, asuransi jiwa, mobil, kapal, pesawat terbang, properti/real estat, dan aset berharga lainnya seperti lukisan dan perhiasan. Pajak properti di Swiss berkontribusi 7,3% terhadap pendapatan, lebih baik dari rata-rata negara-negara OECD yaitu 5,6%
<b>Norwegia</b>	Pajak kekayaan kota dan pajak kekayaan negara	Norwegia mengenakan pajak kekayaan kota dan kekayaan negara, dengan tarif progresif dari 0,3% - 1,1%. Tarif pajak kota adalah 0,7%, dikenakan pada penduduk yang masih lajang dengan kekayaan di atas 1,7 juta NOK dan untuk pasangan dengan kekayaan di atas NOK 3,4 juta. Tarif pajak kekayaan negara adalah 0,3% dan dihitung berdasarkan aset yang melebihi basis pajak modal bersih sebesar NOK 1,7 juta untuk wajib pajak lajang/belum menikah dan NOK 3,4 juta untuk pasangan menikah. Sejak tahun 2022, kebijakan baru untuk tarif pajak negara mulai diberlakukan. Untuk kekayaan bersih yang melebihi NOK 20 juta (NOK 40 juta untuk pasangan menikah), tarifnya adalah 0,4%.
<b>Prancis</b>	Impôt de solidarité sur la fortune atau French Real Estate Wealth Tax (IFI) atau pajak properti.	Semula, Perancis mengimplementasi pajak kekayaan bersih. Namun sejak tahun 2018, Perancis hanya mengenakan pajak pada aset real estat, baik yang berada di Perancis maupun di luar negeri. Perancis memiliki Impôt de solidarité sur la fortune atau French Real Estate Wealth Tax (IFI) yang mengenakan pajak tahunan terhadap kekayaan individu dengan nilai properti bersih di atas EUR 1,3 juta. Sementara warga negara asing hanya dikenakan pajak untuk properti yang berada di Perancis, dengan tarif yang sama. Tarif pajak kekayaan di Perancis progresif, mulai dari 0.5% hingga 1.5% bergantung pada nilai bersih properti. Berdasarkan Laporan International Tax Competitiveness Index di tahun 2023, pajak properti di Perancis berhasil berkontribusi 8,9% terhadap pendapatan negara. Angka tersebut jauh lebih baik di atas angka rata-rata negara OECD yaitu 5,6%.
<b>Italia</b>	Pajak properti (IMU)	Sama seperti Perancis, Italia mengenakan pajak properti yang disebut Imposta Municipale Unica (IMU). IMU adalah pajak properti kota tahunan yang dipungut atas pendapatan kadaster properti. IMU hanya dikenakan pada rumah kedua dan rumah mewah seperti villa atau kastil. Sedangkan rumah yang menjadi tempat tinggal utama—ditinggali setiap hari—tidak dikenakan pajak IMU. Italia juga memberikan potongan pajak sebanyak 50% terhadap bangunan yang memiliki nilai sejarah dan seni. Tarif pajak properti yang harus dibayarkan bergantung pada nilai properti, lokasi, dan status kependudukan, mulai dari 0,4% sampai 0,8%. Terkini, penduduk Italia yang memiliki properti di luar negeri akan dikenakan tarif pajak 1,06% per tahun 2024, 0,76% lebih tinggi dibanding di tahun 2023.
<b>Spanyol</b>	Pajak kekayaan bersih	Negara demokrasi dengan PDB terbesar kelima belas di dunia ini mengenakan pajak kekayaan bersih pada individu dengan kekayaan di atas €3 juta, dengan tarif 0,2% - 3,5%. Sayangnya, pajak kekayaan Spanyol memberikan banyak pengecualian seperti pada perhiasan, perahu, pesawat terbang, karya seni, serta kekayaan intelektual dan industri seperti saham dan emiten. Pengecualian ini dinilai para ekonom menjadi celah untuk menghindari pajak.

OPINI

# Indonesia Perlu Ikuti Jejak Korea Selatan dan Taiwan



OLEH:  
SUGENG BAHAGIJO

Direktur Rumah Politik  
Kesejahteraan RPK

Indonesia memiliki peluang untuk mengikuti jejak industrialisasi Korea Selatan dan Taiwan sebagai peta jalan untuk menjadi negara maju. Model industrialisasi kedua negara ini dapat menjadi referensi berharga bagi Indonesia dan negara lain yang ingin mencapai kemajuan serupa.

Jepang telah berhasil membangun kembali industrinya setelah Perang Dunia II, meluncurkan produk nonmiliter yang kompetitif seperti mobil, elektronik, dan kendaraan komersial. Inti dari pencapaian ini adalah strategi proaktif negara tersebut dalam menciptakan pasar swasta (marketcraft), daripada secara pasif menunggu mekanisme pasar berkembang, seperti yang dicatat oleh Steven K. Vogel dalam karyanya, "Marketcraft: How Governments Make Markets Work."

Pengalaman Korea Selatan dan Taiwan menyerupai kisah Cinderella

masa kini dalam sektor industri. Narasi yang memukau ini menunjukkan bagaimana kedua negara itu, yang dulunya sebagian besar adalah agraris dengan tingkat pendidikan rendah (SD-SMP), telah mengatasi berbagai tantangan untuk bertransformasi menjadi negara industri maju dalam waktu sangat singkat, hanya tiga dekade sejak tahun 1970-an. Lompatan dramatis ini jauh melampaui sejarah industrialisasi negara-negara Barat, yang biasanya membutuhkan waktu 40 hingga 100 tahun untuk mencapai kemajuan serupa.

Meskipun Korea Selatan dan Taiwan masing-masing mengadopsi pendekatan yang unik dan konteks sejarah yang berbeda, mereka memiliki beberapa kesamaan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Korea Selatan cenderung lebih mengandalkan konglomerat besar yang dikenal sebagai chaebol, sedangkan Taiwan



berfokus pada pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) dan diversifikasi industri. Taiwan memiliki sistem politik yang lebih demokratis lebih awal daripada Korea Selatan, yang mengalami pemerintahan otoriter selama periode awal industrialisasi.

Berikut beberapa ciri utama kebijakan dan pendekatan dalam pelaksanaan industrialisasi di Korea Selatan dan Taiwan.

### 1. Intervensi Pemerintah yang Kuat.

Negara menciptakan pemain pasar dan membantu agar industri bisa tumbuh dan menciptakan lapangan kerja. Pemerintah Korea Selatan, terutama di bawah kepemimpinan Park Chung-hee, memainkan peran yang sangat sentral dalam mengarahkan perekonomian. Pemerintah mendukung konglomerat besar yang dikenal sebagai chaebol (seperti Samsung, Hyundai, dan LG) melalui kebijakan insentif, subsidi, serta pembiayaan. Negara mengarahkan investasi ke sektor-sektor yang dianggap strategis, seperti baja, otomotif, elektronik, dan teknologi informasi. Di Taiwan, pemerintah juga memainkan peran penting tetapi dengan pendekatan yang sedikit berbeda. Taiwan berfokus pada pengembangan sektor usaha kecil dan menengah (UKM) dan mendorong diversifikasi industri. Pemerintah mendirikan kawasan industri dan pusat penelitian untuk membantu perusahaan mengakses teknologi dan meningkatkan kapasitas produksi.

### 2. Ekspor sebagai Mesin Pertumbuhan.

Kedua negara ini mengadopsi strategi industrialisasi yang berorientasi ekspor. Mereka memanfaatkan pasar internasional sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi, mengimpor teknologi dan komponen yang diperlukan, lalu memproses dan mengekspornya kembali sebagai

## RINGKASAN SOLUSI

1. Indonesia harus mulai mengidentifikasi dan menetapkan industri dan sektor utama yang menjadi prioritas. Kriteria untuk prioritas ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan ekspor dan penciptaan lapangan kerja padat karya.

2. Indonesia perlu segera beralih ke sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan (energi hijau).

3. Kebutuhan mendesak untuk meningkatkan sektor kesehatan dalam skala luas

4. Terdapat kebutuhan mendesak untuk mengembangkan sumber daya manusia Indonesia untuk memenuhi tuntutan tenaga kerja abad ke-21.

produk jadi. Produk-produk elektronik, tekstil, dan otomotif menjadi andalan ekspor yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

### 3. Investasi dalam Pendidikan dan Keterampilan.

Di Korea Selatan, bidang pendidikan menempati prioritas tinggi dalam kebijakan nasional, dengan fokus pada peningkatan literasi dan keterampilan teknis yang dibutuhkan dalam industri. Hal ini menciptakan tenaga kerja yang sangat terampil, yang menjadi aset penting dalam mendukung transformasi industri negara. Taiwan juga menekankan pendidikan, terutama dalam bidang teknologi dan sains. Investasi besar-besaran dalam pendidikan menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, yang mendukung pertumbuhan industri teknologi tinggi seperti semikonduktor, di mana Taiwan kini menjadi pemain utama global.

### 4. Reformasi Agraria dan Pembangunan Pedesaan.

Pada tahap awal industrialisasi, Korea Selatan melakukan reformasi agraria yang mendistribusikan tanah kepada para petani, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan produksi pangan. Reformasi ini juga memberikan basis modal bagi perkembangan sektor industri melalui penjualan hasil tani. Taiwan melakukan reformasi agraria serupa, yang mendistribusikan tanah kepada petani dan mengurangi pengaruh pemilik tanah besar. Hal

ini menciptakan stabilitas sosial dan meningkatkan kesejahteraan, yang pada gilirannya mendukung ekspansi industri.

### 5. Pembangunan Infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur yang kuat menjadi dasar penting bagi industrialisasi di kedua negara. Investasi besar dalam infrastruktur fisik seperti jalan, pelabuhan, dan listrik memungkinkan industri untuk berkembang dengan cepat dan efisien.

### 6. Adaptasi Teknologi dan Inovasi.

Korea Selatan telah beralih dari sekadar mengimpor teknologi menjadi mengembangkan teknologinya sendiri melalui investasi signifikan dalam penelitian dan pengembangan (R&D). Transformasi ini terlihat jelas dalam pengembangan industri berteknologi tinggi, khususnya di sektor elektronik dan otomotif. Demikian pula Taiwan memprioritaskan R&D, khususnya di industri semikonduktor dan teknologi informasi. Perusahaan Manufaktur Semikonduktor Taiwan (TSMC) merupakan contoh keberhasilan Taiwan dalam menciptakan teknologi kelas dunia.

Setidaknya Indonesia harus mulai menetapkan bidang dan sektor utama industri yang menjadi prioritas. Kriteria prioritas bisa didekatkan dengan kebutuhan ekspor, penciptaan lapangan kerja-padat karya. Kedua, kebutuhan Indonesia melakukan transisi energi menjadi energi terbarukan dan energi hijau. Ketiga, urgensi mendukung perbaikan skala luas untuk bidang

kesehatan – vaksin, alat kesehatan, modernisasi rumah sakit dan pendidikan kedokteran. Keempat, urgensi untuk mengolah SDM Indonesia menjadi angkatan kerja abad ke-21.

## Bagaimana dengan Indonesia?

*Pertama*, Indonesia harus mulai mengidentifikasi dan menetapkan industri dan sektor utama yang menjadi prioritas. Kriteria untuk prioritas ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan ekspor dan penciptaan lapangan kerja padat karya. *Kedua*, Indonesia perlu segera beralih ke sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan (energi hijau). *Ketiga*, ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan sektor kesehatan dalam skala luas, dengan fokus pada vaksin, peralatan medis, modernisasi rumah sakit, dan pendidikan kedokteran. *Keempat*, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengembangkan sumber daya manusia Indonesia untuk memenuhi tuntutan tenaga kerja abad ke-21.

Aspek penting dalam reindustrialisasi Indonesia adalah pendekatan strategisnya. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri atau hanya mengandalkan badan usaha milik negara (BUMN). Oleh karena itu, kemitraan dan kolaborasi dengan sektor industri dalam negeri sangat penting, disesuaikan dengan kapasitas, teknologi, dan bidang keahliannya. Misalnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, universitas, badan usaha milik negara, dan perusahaan swasta sangat penting untuk mengembangkan inisiatif energi terbarukan atau energi hijau. Selain itu, kemitraan diperlukan untuk memproduksi peralatan medis canggih, seperti mesin MRI dan alat bantu pernapasan, yang sangat dibutuhkan. Kolaborasi juga diperlukan dalam pengolahan produk pertanian dan perikanan untuk pasar ekspor dan domestik, termasuk cokelat, kopi, dan makanan laut. Pada akhirnya, membina kemitraan untuk menciptakan 50 juta pekerja terampil melalui pelatihan vokasi dan magang industri sangat penting.

---

## REFERENSI

1. Steven k. Vogel, 2018, Marketcraft: How Governments Make Markets Work
2. Steven K. Vogel, 2006, Japan Remodeled: How Government and Industry Are Reforming Japanese Capitalism
3. Ha Joon Chang, 2002, Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective
4. Ha Joon Chang, 2010, 23 Things They Don't Tell You About Capitalism
5. Robert Wade, 1990, Governing the Market: Economic Theory and the Role of Government in East Asian Industrialization
6. Robert Wade, 2003, What Strategies Are Viable for Developing Countries Today? The World Trade Organization and the Shrinking of 'Development Space'
7. Robert Wade, 2007, The Role of Industrial Policy in Developing Countries
8. Alice H. Amsden (1992), Industrial Policy, Innovation and Economic Growth: The Experience of Taiwan and South Korea
9. John C. H. Fei, Gustav Ranis, dan Shirley W. Y. Kuo (1979), Industrial Development in Taiwan: Past Achievements and Future Challenges

# Ragam Solusi Demokratisasi Ekonomi – Pemerataan Ekonomi



1

## Pemberlakuan UU Perampasan Aset



Amerika, Inggris, Australia adalah contoh negara telah menerapkan UU Perampasan Aset. Untuk mencegah, dan memiskinkan koruptor.

2

## Penerapan Pajak Kekayaan atau **Wealth Tax** kepada 5-10% superkaya Indonesia



Sudah dilakukan di banyak negara.. Thomas Piketty mengusulkan Pajak Kekayaan global.

3

## Jaminan Tunjangan Tunai semesta atau **Universal Basic Income**



Sudah banyak dianjurkan dan mulai dipraktikkan. Usulan oleh Philippe van Parijs. Guru besar ekonomi dan filsafat UCL Belgia

4

## Subsidi Tunjangan Tunai untuk Ibu Hamil untuk mencegah mengatasi **stunting**



Meningkatkan daya beli/ keuangan pencari kerja dan anak muda untuk bisa ikut serta pemagangan dan pelatihan vokasi dan profesional.

5

## Hibah Warga Negara atau **Stakeholder Grant**



Ditujukan untuk semua warga sekali seumur hidup kepada warga yang menginjak usia 18/19 tahun ketika harus memutuskan melanjutkan kuliah atau bekerja.

6

## Memperluas beasiswa LPDP Kepada Guru, Dokter dan Nakes dan pengajar di Pondok pesantren



Model beasiswa GI Bill di Amerika atau kebijakan Federal Loan di Amerika. Tujuannya meringankan beban biaya belajar.

7

## Kemitraan antara pemerintah dan industri melalui beasiswa



untuk pelatihan vokasi, Pemagangan dan Sertifikasi. Karena Indonesia harus mengejar kekurangan 50 juta tenaga trampil dan profesional.

8

## Saham untuk Karyawan atau **Employee ownership** untuk perusahaan Tbk



Sudah banyak dipraktikkan di Inggris dan Amerika, Kanada. Di Kanada dan Inggris sudah ada asosiasinya.